



Setelah Relokasi PKL, Ajak Ngobrol Pemilik Toko

JOGJA, Radar Jogja - Pemprov DIY bergerak cepat untuk mewujudkan Warisan Budaya Tak Benda Sumbu Filosofi. Setelah merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, selanjutnya komunikasi dengan pemilik toko. Sebelum ifm verifikasi dari UNESCO datang Juni nanti. ▶ *Baca Setelah... Hal 7*



SUDAH BUKA: Suasana sisi luar Teras Malioboro, Kota Jogja, kemarin (26/1). Teras Malioboro akan menjadi tempat relokasi bagi PKL Malioboro. Foto kiri, Pedagang kaki lima mengangkut gerobak dagangannya untuk dibawa pulang menggunakan jasa angkut, di kawasan Malioboro, Kota Jogja, karena sudah tidak boleh berjualan.

FOTO: FOTO: GUNTUR ASA/TIRTANARADAR JOGJA

Setelah Relokasi PKL, Ajak Ngobrol Pemilik Toko

Sambungan dari hal 1

Gubernur DIY H Hamengku Buwono X mengatakan, akan melakukan dialog dengan para pemilik toko di sepanjang Malioboro. Terkait ruang terbuka bekas para PKL yang selama ini terpakai dan menjadi kosong. Pasalnya space kurang lebih lima meter tersebut bukan merupakan aset Pemprov DIY. "Yang ruang publik yang lima meter itu sama saja saya aku (akui kepemilikan) milik pemrov yang sebetulnya bukan aset pemprov. Itu kan pidana, itu saya hindari sehingga kondisi seperti ini nanti Juni tim dari UNESCO akan datang melakukan verifikasi, jangan sampai hal ini menjadi teruan sehingga mempersulit posisi kita," HB X usai acara Wilujengan atau Selamatan di Teras Malioboro 1 atau Eks Bioskop Indera, kemarin (26/1).

HB X akan mengembalikan aset tersebut dengan catatan tidak boleh untuk keperluan usaha tokonya. "Nanti kami juga akan berjumpa di kesempatan lain dengan para pemilik toko untuk mengembalikan aset mereka yang dulu di-krowok (dipakai) itu yang mestinya berfungsi untuk pejalan kaki," jelas HB X. "Jadi akan saya serahkan kembali dengan catatan itu tetap menjadi ruang publik pejalan kaki tapi jangan nanti di situ toko ne njembarke (diperluas) untuk jualan ya jangan."

Terkait relokasi PKL, HB X berencana akan membebaskan retribusi bagi mereka. Pembebasan retribusi akan dilakukan selama satu tahun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. "Dalam waktu satu tahun anggaran ini tidak akan menarik pajak apa pun," ujar Raja Keraton Jogja itu.

Dalam kesempatan itu, HB X juga menegaskan seluruh PKL



GUNTER AGA TITIKANARADAR, JOGJA

DIRESMIKAN:
Gubernur DIY Hamengku Buwono X didampingi Sekprov DIY Kardamanta Baskara Aji (kiri) dan Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi se usai meninjau Teras Malioboro, Kota Jogja, kemarin (26/1).

Malioboro segera pindah ke lokasi baru dan tidak boleh berdagang di sepanjang Malioboro. "Tidak boleh ada lagi PKL jualan di sepanjang Malioboro," tegasnya.

Sementara itu, seorang pedagang sepatu bernama Veronika mengaku sudah mendapatkan lapak di lantai 3 Teras Malioboro 1. Dia ikut dipindah dari Jalan Mataram Jogja dan mengaku lapak yang diberikan terlalu kecil dengan ukuran sekitar 1,5 x 1 meter. "Lapak ini paling hanya bisa menampung 20 sepatu, padahal sepatu yang kami jual cukup banyak sehingga tidak bisa tertampung," ujarnya.

Satu model sepatu saja memiliki banyak ukuran apalagi dengan banyaknya model sehingga stock harus disediakan banyak. Dia mengaku butuh gudang atau tempat penyimpanan yang memadai untuk menyimpan stok sepatu.

"Kami pun akhirnya mengajukan gudang untuk menyimpan barang di sini, tapi sampai sekarang masih molor. Padahal kami harus pindah 28 (Januari)," imbuhnya.

Dipindah sebelum Lebaran, supaya Dicari Wisatawan

Sebanyak 1.838 pedagang kaki lima (PKL) Malioboro mulai direlokasi di dua tempat yakni bekas eks gedung Bioskop Indra dan bekas gedung Dinas Pariwisata DIY. Relokasi ditargetkan rampung pertengahan Februari 2022.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Kardamanta Baskara Aji mengatakan alasan pemindahan

PKL Malioboro sebelum Hari Raya Idul Fitri bukan tanpa sebab. Aji menegaskan pemindahan sebelum lebaran sudah dipertimbangkan secara matang. "Justru itu sudah dipikirkan betul. Kalau mengambil momen lebaran ada di Malioboro, orang taunya itu tempat belanja di malioboro, tapi pada saat lebaran orang itu keinginannya untuk belanja sangat tinggi begitu melihat malioboro kosong mereka akan mencari di mana mereka belanja jadi dia akan datang di situ," papar Aji ditemui kemarin (26/1) di DPRD DIY.

Dengan begitu, menurut Aji, momentum lebaran dapat dijadikan salah satu upaya agar tempat baru bagi PKL tersebut bisa dikenal oleh masyarakat dan wisatawan sebab mereka akan datang dan belanja di kawasan Malioboro.

Pemprov DIY berkomitmen bukan hanya menyediakan lapak namun juga membantu pemasaran dan *flow* kunjungan ke lokasi baru. "Nah sejak besok lebaran itu orang seluruh Indonesia tahu bahwa belanja nya tidak di jalan tapi di sebuah tempat yang sangat layak dan baik untuk PKL," jelas Aji. "Kami tetap akan fasilitas untuk pemasarannya, petunjuk rambu agar orang bisa datang ke situ," imbuhnya.

Nantinya, seluruh PKL Malioboro akan diundi terlebih dahulu sebelum masuk lokasi baru melalui komunitas masing-masing sehingga jelas lokasi yang akan menjadi tempat mereka jualan dan diharapkan bisa adil. (cr4/prs/fj/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005